**IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL DANA DESA (DD) UNTUK PEMBANGUNAN PENGENTASAN KEMISKINAN DI KECAMATAN SALAM BABARIS KABUPATEN TAPIN**

AKHMAD

17.93.0026

PROGRAM PASCA SARJANA ADMINISTRASI PUBLIK

UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)

MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI

BANJARMASIN

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Untuk mengkaji dan menganalisis Implementasi Program Nasional Dana Desa (DD) pada pengentasan kemiskinan di Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin; (2) Untuk mengkaji dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam program Dana Desa (DD); (3) Untuk menganalisis kendala-kendala dalam proses pemberdayaan masyarakat melalui program Dana Desa (DD).

Guna memperoleh gambaran yang aktual dan akurat, maka peneliti mengawali pelaksanaan penelitian pada bulan oktober 2019 dan diperkirakan selesai pada akhir desember 2019, dan lokasi penelitian di Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin. Adapun kegunaan penelitian ini adalah : (1) Untuk bahan penelitian implementasi Program Nasional Dana Desa (DD) berikutnya; (2) Untuk organisasi mengetahui faktor-faktor keberhasilan apa dalam apa saja dalam implementasi Dana Desa (DD) pada pengentasan kemiskinan di Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin; (3) Untuk memberikan Masukan terhadap konsekuensi kebijakan pemerintah dimasa akan datang.

Populasi penelitian ini adalah warga masyarakat Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin yang terdiri dari 34 orang.

Untuk penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif dan jenis penelitian ini menurut pendekatannya tergolong penelitian kebijakan (*Policy Reseach*), adapun untuk teknik pengambilan sampel (sampling) menggunakan *Porposive Sampling* dan *Teknik Cluster Sampling* sedangkan teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Teknik Kualitaif*.

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisa data, maka temuan penelitian ini dapat disimpulkan : (1) Bahwa Implementasi Dana Desa (DD) di Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin secara umum sudah berjalan dengan baik; (2) Partisipasi masyarakat dalam program Dana Desa (DD) pada pengentasan kemiskinan di Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin berhasil dengan baik; (3) Sumber daya manusia adalah salah satu kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan program dana desa. Temuan hasil penelitian menunjukan adanya faktor-faktor keberhasilan dalam implementasi Dana Desa (DD) di Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin,

Kata Kunci : Implementasi, Dana Desa

ABSTRACT

This study aims to : (1) Analyze the implementation of the National Program for Village Fund (DD) on poverty reduction in sub Salam Babaris Tapin district, (2) Analyze participation in the Village Fund, (3) Analyze constraints in the process community empowerment through Village Fund,

In order to obtain timely and reliable, the researchers began conducting research in October 2019 and is expected to be completed by the end of December 2019, and the study side in the District Salam Babaris Tapin district. The usefulness of this study were: (1) The implementation of the National Program for Village Fund (DD) next, (2) Organization of knowing what the success factors in the implementation of village fund on poverty alleviation in Sub Salam Babaris Tapin district; (3) Provide input to the consequences of the Government’s policy in the future.

The population was Salam Babaris District residents Tapin district consisting of 34 people.

For the study, researchers used qualitative research methods and types of research are, according to classified research approach policy (Policy Reseach), as for sampling (sampling) using Porposive Sampling and Cluster Sampling Technique while data analysis technique used in this study is Qualitative techniques.

Based on the discussion and analysis of the data, the findings of this study can be concluded: (1) That the implementation of Village Fund in District Salam Babaris Tapin district in general has been good, (2) Participation community in program of Village Fund on poverty alleviation in sub District Salam Babaris Tapin successfully well, (3) Human resource is one of constraints which was found in program Village Fund. The findings of the research showed the success factors in the implementation of Village Fund in District Salam Babaris Tapin district.

Keywords : Implementation, Village Fund

1. **Pendahuluan**

**1.1 Latar Belakang**

Kemiskinan merupakan salah satu masalah serius pemerintah pusat dan daerah yang sedang dihadapi oleh daerah-daerah di Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam upaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, baik secara nasional maupun secara kasus perkasus. Pada masa otonomi daerah saat ini, pengentasan kemiskinan tidak lagi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat tetapi pemerintah daerah mempunyai kewajiban yang sangat besar untuk mengatasi masalah kemiskinan yang ada di daerahnya.

Penanggulangan kemiskinan telah menjadi prioritas tertinggi program pemerintah dan sejalan dengan itu, pemerintah telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) berdasarkan peraturan Presiden RI nomor 54 tahun 2005 dan telah diperbaharui dengan peraturan Presiden RI nomor 13 tahun 2009 tentang koordinasi penangulangan kemiskinan. TKPK mempunyai tugas melakukan langkah-langkah konkrit untuk mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin diseluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia melalui koordinasi dan singkronisasi penyusunan dan pelaksanaan penajaman penanggulangan kemiskinan serta memantau pelaksanaan penanggulangan kemiskinan sesuai karakteristik dan potensi di daerah dan kebijakan lanjutan yang ditetapkan daerah dalam rangka penanggulangan kemiskinan di daerah masing-masing.

Program prioritas penanngulangan kemiskinan yaitu pemenuhan kebutuhan dasar dan pengembangan usaha bagi kelompok miskin dengan target:

1. Tercapainya keamanan dan stabilitas bagi aktifitas perekonomian skala kecil.
2. Tercapainya peningkatan dan pengembangan sarana dan kualitas kesehatan serta pelayanan pendidikan.
3. Tercapainya peningkatan produktifitas pelaksanaan program tersebut adalah dengan meningkatkan kerja sama antar sector dan kerja sama antar pemerintah pusat dan daerah, lembaga kemasyarakatan serta kelompok miskin.

Tiga pilar utama dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yaitu **pertama**, mengembangkan kesempatan-kesempatan ekonomi bagi kelompokm masyarakat miskin; **kedua**, memberdayakan kapasitas dan kemampuan kelompok masyarakat miskin; dan **ketiga**, meningkatkan kualitas jarring pengaman sosial bagi kelompok masyarakat yang tergolong sangat miskin.

Seiring dengan berjalannya otonomi daerah, secara mandiri telah mendorong beberapa daerah untuk melakukan terobosan guna mengatasi masalah kemiskinan yang ada di daerah. Upaya dalam menaggulangi kemiskinan di daerah melalui program yang direncanakan oleh pemerintah pusat maupun terobosan-terobosan yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui pemberdayaan masyarakat, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peran aktif masyarakat itu sendiri dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi.

Dalam melaksanakan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tapin melaksanakan :

1. Menyiapkan data terkini tentang KK miskin sesuai dewngan kondisi dan persepsi daerah;
2. Melakukan koordinasi vertical dan horizontal dengan instansi terkait;
3. Memfasilitasi penajaman penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) dan APBD serta sumber dana lainnya untuk menanggulangi kemiskinan;
4. Memantau, mengendalikan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di kabupaten Tapin
5. Menyusun strategi penanggulangan kemiskinan di kabupaten Tapin;
6. Berdasarkan tugas ini ditargetkan dapat menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Tapin.

Chambers (1995) menyatakan bahwa pemberdayaaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai social. Konsep ini mencerminkan paradigm baru pembangunan, yakni yang bersaifat “*people centered, participatory, empowering, and sustainab”’* (kekuasaan berpusat rakyat, partisipasi, pemberdayaan dan berkelanjutan).

Program kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin adalah untuk pemberdayaan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan. Salah satu program kerjanya adalah Program Nasional Dana Desa (DD). Dana Desa merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk mengurangi kemiskinan masyarakat di pedesaan. Secara khusus dana desa dirancang untuk meningkatkan keterpaduan pengembangan usaha produktif dan pembangunan prasarana serta sarana pedesaan. Pengelolaan dana desa ini diberiak secara langsung kepada masyarakat desa di kecamatan melalui kas daerah kabupaten. Pendekatan yang digunakan program dana desa adalah pemberdayaan masyarakat, dimana masyarakat penerima bantuan diberikan kebebasan dalam menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan atas dasar kesepakatan melalui musyawarah.

Pelaksanaan program dana desa mengacu pada azas otonomi desa sepenuhnya bagi masyarakat yaitu dari, oleh dan untuk amsyarakat. Seluruh proses kegiatan dalam program dana desa pada hakekatnya memiliki dimensi yaitu memberikan kewenangan dan mengambil keputusan secara terbuka dan penuh tanggung jawab serta menyediakan dukungan lingkungan yang kondusif untuk mewujudkan peran masyarakat dalam pembangunan, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan mereka sendiri.

Berdasarkan data hasil penelitian penduduk miskin tahun 2019 di kabupaten Tapin menunjukkan bahwa jumlah penduduk kabupaten Tapin sebanyak 187.510 jiwa atau 57.444 KK, dari jumlah keseluruhan penduduk yang ada, penduduk yang tergolong keluarga miskin berjumlah 14.232 jiwa ada penurunan disbanding tahun 2018 penduduk keluarga miskin berjumlah 15.481 jiwa dari jumlah penduduk sebanyak 186.672 jiwa.

Pemerintah Kabupaten Tapin terdiri dari 12 kecamatan, salah satu kecamatannya adalah Salam Babaris yang merupakan kecamatan pemekaran dari Kecamatan Tapin Selatan.

Bertitik tolak dari uraian di atas dan mengingat Kecamatan Salam Babaris merupakan kecamatan baru, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang pelaksanaan program nasional tentang dana desa Kecamatan di desa dalam wilayah Kecamatan Salam Babaris.

* 1. **Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah implementasi Program Nasional Dana Desa untuk pembangunan pengentasan kemiskinan di Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam Program Nasional Dana Desa (DD)?
3. Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pemberdayaan masyarakat melalui Program dana Desa di Kecamatan Salam Babaris?
   1. **Tujuan Penelitian**

Tujuan yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan adalah :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis implementasi pemberdayaan masyarakat melalui program dana desa penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Salam Babaris.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam program nasional dana desa (DD)
3. Untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pemberdayaan masyarakat melalui program dana desa di Kecamatan Salam Babaris.
   1. **Manfaat Penelitian**
4. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis kepada berbagai pihak yang berminat dalam menganalisa program dana desa dari berbagai sudut pandang.

1. Manfaat praktis

Bagi organisasi, sebagai bahan masukan agar dapat memahami dan mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan implementasi program dana desa, sehingga dengan demikian para pemimpin dapat lebih menyempurnakan program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan di daerah.

1. Manfaat Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Bagi peneliti berikutnya, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan pertimbangan apabila ingin meneliti lebih lanjut mengenai implementasi program dana desa di Kecamatan Salam Babaris.

1. **Kerangka Konseptual**

Teori agensi menyangkut hubungan kontraktual antara dua pihak yaitu *principals* dan *agents.* Pihak *principals* adalah pihak yang memberikan mandate pada pihak lain, yaitu *agents* untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principals* dalam kapasitasnya pengambil keputusan (Jansen dan Smith, 1984). Pada organisasi sektor publik dibangun atas dasar teori agensi. Teori agensi memandang bahwa pemerintah desa yaitu kepala desa dan aparat desa lainnya sebagai agen bagi masyarakat desa (*principals*) akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingan mereka sendiri. Hubungan kontrak yang dimaksud adalah pendelegasian wewenang kepada *agents* untuk melakukan semua pekerjaan secara bertanggung jawab kepada pemerintah bagi agensi teori pengelolaan pemerintah desa harus diawasi untuk memastikan bahwa pengelolaan dana desa (DD) dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku yang telah membuat Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelola keuangan desa dan menjadi kepanjangan dari masyarakat desa sebagai pemberi amanah dalam pelaksaan tugas.

Kerangka Konseptual

Program Nasional Dana Desa (DD)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Implementasi Program Nasional Dana Desa (DD)

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Penatausahaan
4. Pelaporan
5. Pertanggung Jawaban

Kendala-kendala yang dihadapi dalam Pembangunan Program Dana Desa

Upaya Mengatasi Hambatan Pembangunan Program Dana Desa (DD)

1. **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan memperoleh gambaran untuk memahami dan menjelaskan pengelolaan implemantasi program dana desa (DD) dalam penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin.

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder, data primer langsung diperoleh dari tim pelaksana pekerjaan, perangkat desa, masyarakat yang memahami kontek masalah yang di teliti di Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin dengan menggunakan daftar pertanyaan dalam bentuk kuesioner atau wawancara guna mengumpulkan informasi dari objek penelitian tersebut. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau dari pihak ketiga atau literature, tulisan atau dokumentasi. Tulisan-tulisan sebagai pembanding dari data yang diperoleh yaitu Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, PP nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dan Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah peneliti sendiri dengan menggunakan alat bantu panduan :

1. Observasi
2. Kuesioner
3. Wawancara
4. Dokumentasi
5. **Gambaran Umum Tempat Penelitian**

Kecamatan Salam Babaris adalah salah satu kecamatan dari 12 Kecamatan di Kabupaten Tapin. Luas wilayahnya 72,80 Km2 atau 3,35% dari luas Kabupaten Tapin. Kecamatan Salam Babaris mempunyai 6 desa yaitu Desa Salam Babaris, Desa Pantai Cabe, Desa Suato Baru, Desa Suato Lama, Desa Kambang Habang Lama dan Desa Kambang Habang Baru.

Batas-batas wilayah Kecamatan Salam Babaris adalah sebagai berikut :

* Sebelah utara bernbatasan dengan : Kecamatan Bungur
* Sebelah selatan berbatasan dengan : Kecamatan Binuang
* Sebelah barat berbatasan dengan : Kecamatan Tapin Selatan
* Sebelah timur berbatasan dengan : Kecamatan Telaga Bauntung

Kabupaten Banjar

Jarak kecamatan ke ibukota kabupaten 18 km dan jarak ke ibukota provinsi 111 km sedangkan waktu tempuh diukur dengan mempergunakan alat transportasi yang biasa digunakan masyarakat ke ibukota provinsi ± 4 jam.

1. **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

**Hasil Penelitian**

Salah satu agenda utama Program Nasional yang sekarang dengan sebutan Program Nasional Dana Desa (DD) adalah menyelesaikan masalah rendahnya kesejahteraan rakyat. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program-program nasional penangulangan kemiskinan. Dalam pelaksanaannya, program ini telah mengembangkan kelembagaan pembangunan di daerah khususnya kecamatan dan desa, meningkatkan kinerja manajemen pembangunan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksaan dan pengawasan.

Tahun anggaran 2018/2019 Kecamatan Salam Babaris mendapatkan bantuan dana Program Nasional Dana Desa (DD) melalui kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin, sebesar Rp. 4.193.946.000,- (Empat milyar serratus sembulan puluh tiga juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah) untuk tahun 2018 dan Rp. 4.774.047.395 (Empat milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta empat puluh tujuh ribu tiga ratus Sembilan puluh lima rupiah) untuk tahun 2019, dengan serapan dana dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini.

Daftar Dana Desa (DD) Tahun 2018 di Kecamatan Salam Babaris

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Nama Desa | Dana Desa (DD) | Serapan | % Serapan |
| 1. | Pantai Cabe | Rp. 729.060.000 | Rp. 723.160.703 | 99,19 % |
| 2. | Salam Babaris | Rp. 749.930.000 | Rp. 737.693.885 | 98,37 % |
| 3. | Suato Baru | Rp. 671.685.000 | Rp. 649.061.351 | 96, 63% |
| 4. | Suato Lama | Rp. 671.447.000 | Rp. 663.981.117 | 98,89% |
| 5. | Kambang Habang Lama | Rp. 696.459.000 | Rp. 691.343.864 | 99,27% |
| 6. | Kambang Habang Baru | Rp. 675.365.000 | Rp. 590.120.105 | 87,38% |
|  | Jumlah | Rp. 4.193.946.000 | Rp. 4.005.361.025 | 96,70% |

Daftar Dana Desa (DD) Tahun 2019 di Kecamatan Salam Babaris

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Nama Desa | Dana Desa (DD) | Serapan | % Serapan |
| 1. | Pantai Cabe | Rp. 841.659.893 | Rp. 784.661.765 | 93,23 % |
| 2. | Salam Babaris | Rp. 872.600.638 | Rp. 848.385.720 | 97,22 % |
| 3. | Suato Baru | Rp. 755.289.371 | Rp. 703.006.988 | 93,08% |
| 4. | Suato Lama | Rp. 754.442.186 | Rp. 734.708.937 | 97,38% |
| 5. | Kambang Habang Lama | Rp. 791.285.630 | Rp. 736.827.721 | 93,12% |
| 6. | Kambang Habang Baru | Rp. 758.769.677 | Rp. 738.872.586 | 97,38% |
|  | Jumlah | Rp. 4.774.047.395 | Rp. 4.546.463.717 | 95,23% |

**Pembahasan**

Variabel dalam penelitian ini adalah implementasi program Nasional Dana Desa (DD) terhadap masyarakat kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin

Hasil kuesioner yang dibagikan kepada informan yang berjumlah 34 orang dengan persentasi sebagai berikut :

1. Pertanyaan nomor 1 kualitas pelaksanaan Program Nasional Pembangunan Dana Desa (DD), jawaban informan tertinggi 23 orang (67,7%) menjawab **baik.**
2. Pertanyaan nomor 2 kualitas penyuluhan dan penerangan dalam rangka pelaksanaan Program Nasional Pembangunan Dana Desa (DD), jawaban informan tertinggi 23 orang (67,7%) menjawab **baik.**
3. Pertanyaan nomor 3 tingkat intensitas (frekuensi) penyuluhan dan penerangan dari pemerintah dalam rangka Program Nasional Dana Desa (DD), jawaban informan tertinggi 13 orang (38,2%) menjawab cukup **intensif.**
4. Pertanyaan nomor 4 tingkat pemahaman petugas atau aparat dari pemerintah dalam melaksanakan Program Nasional Dana Desa (DD), jawaban informan tertinggi 19 orang (55,9%) menjawab **memahami.**
5. Pertanyaan nomor 5 tingkat efektifitas struktur organisasi pelaksana kebijakan Program Nasional Dana Desa (DD), jawaban informan tertinggi 19 orang (55,9%) menjawab **efektif.**
6. Pertanyaan nomor 6 tingkat efektifitas pembagian kerja dalam rangka pelaksana kebijakan Program Nasional Dana Desa (DD), jawaban informan tertinggi 19 orang (55,9%) menjawab **efektif.**
7. Pertanyaan nomor 7 tingkat efektifitas pelimpahan wewenang dalam rangka pelaksana kebijakan Program Nasional Dana Desa (DD),jawaban informan tertinggi 16 orang (47,1%) menjawab **efektif.**
8. Pertanyaan nomor 8 tingkat koordinasi dalam rangka implementasi kebijakan Program Nasional Dana Desa (DD), jawaban informan tertinggi 24 orang (70,6%) menjawab **koordinatif.**
9. Pertanyaan nomor 9 tingkat efektifitas kesatuan pemerintah dalam rangka pelaksana kebijakan Program Nasional Dana Desa (DD), jawaban informan tertinggi 24 orang (70,6%) menjawab **efektif.**
10. Pertanyaan nomor 10 jumlah pelaksana (implementor) kebijakan Program Nasional Dana Desa (DD), jawaban informan tertinggi 22 orang (64,7%) menjawab **sesuai kebutuhan.**
11. Pertanyaan nomor 11 kualitas pelaksana (implementor) kebijakan Program Nasional Dana Desa (DD), jawaban informan tertinggi 23 orang (67,7%) menjawab **baik.**
12. Pertanyaan nomor 12 tingkat efesiensi penggunaan anggaran keuangan dalam rangka implementasi kebijakan Program Nasional Dana Desa (DD), jawaban informan tertinggi 18 orang (53%) menjawab **efesien.**
13. Pertanyaan nomor 13 tingkat efesiensi penggunaan peralatan/perlengkapan dalam rangka implementasi kebijakan Program Nasional Dana Desa (DD), jawaban informan tertinggi 22 orang (64%) menjawab **efesien.**
14. Pertanyaan nomor 14 tingkat efesiensi penggunaan sumber daya dalam rangka implementasi kebijakan Program Nasional Dana Desa (DD), jawaban informan tertinggi 21 orang (61,7%) menjawab **efesien.**
15. Pertanyaan nomor 15 tingkat efektifitas metode dan strategi dalam rangka implementasi kebijakan Program Nasional Dana Desa (DD), jawaban informen tertinggi 21 orang (61,7%) menjawab **sesuai kebutuhan.**
16. Pertanyaan nomor 16 sikap pelaksana (implementor) terhadap kebijakan Program Nasional Dana Desa (DD), jawaban informan tertinggi 21 orang (61,7%) menjawab **mendukung.**
17. Pertanyaan nomor 17 tingkat kepatuhan pelaksana (implementor) terhadap keputusan dan peraturan lain dalam kaitannya dengan implementasi kebijakan Program Nasional Dana Desa (DD), jawaban informan tertinggi 19 orang (41,2%) menjawab **patuh.**

Dari hasil kuesinor 34 informan kebanyakan memberikan jawaban yang baik tentang Program Nasional Dana Desa di Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin..

Dari hasil wawancara dengan informan didapatkan bahwa partisipasi masyarakat untuk Program Nasional Dana Desa berjalan dengan baik.

Kendala-kendala yang ditemukan dalam Program Nasional Dana Desa di Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin adalah

* Pembinaan pemberdayaan masyarakat tidak dilakukan secara berkelanjutan sehingga setiap program pemberdayaan yang dilaksanakan tidak dapat berkembang.
* Masih kurangnya sumber daya manusia yang menangani Program Nasional Dana Desa di Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin.
* Masih ada desa yang tidak ada jaringan internet sehingga menyulitkan dalam pelaporan, koordinasi dan informasi.
* Keterlambatan pelaksanaan Program Nasional Dana Desa yang disebabkan oleh perubahan APBDes.

1. **Penutup**

**6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka disimpulkan sebagai berikut :

1. Program Dana Desa (DD) pada pembangunan di Kecamatan Salam Babaris saat ini berdasarkan hasil musyawarah masyarakat desa diprioritaskan kearah pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana jalan menuju pemukiman dan perkebunan sehingga untuk menurunkan angka kemiskinan di Kecamatan Salam Babaris secara langsung belum dapat dirasakan, namun dalam waktu tertentu akan dapat dirasakan nantinya oleh masyarakat untuk mempermudah transportasi dalam membawa hasil perkebunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan harga jual tanah di wilayah pembangunan tempet tinggal mereka.
2. Implementasi Program Nasional Pembangunan yang menggunakan Dana Desa (DD) di Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin secara umum sudah berjalan dengan baik.
3. Partisipasi masyarakat dalam melaksanakanpembangunan program Nsional Dana Desa (DD) di Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin berjalan dengan baik.
4. Temuan hasil penelitian menunjukkan adanya kendala-kendala dalam pemberdayaan Implementasi Program Nasional Dana Desa (DD) di desa Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin. Diantaranya yaitu, Pembinaan pemberdayaan masyarakat tidak dilakukan secara berkelanjutan, sumber daya manusia, Jaringan internet dan perubahan APBDes.
   1. **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disarankan sebagai berikut :

1. Penggunaan anggaran Program Dana Desa (DD) lebih mengarah/menuju kepada penghasilan masyarakat miskin dan Pendapatan Asli Desa (PAD) dengan memanfaatkan potensi desa agar nantinya dapat mandiri untuk dapat membiayai pembangunan desanya sendiri.
2. Kualitas penyuluhan oleh aparat (Implementor) dalam rangka pelaksaan Pembangunan Program Nasional Dana Desa (DD), hal inim dapat dilakukan dengan mengikutsertakan petugas pada pelatihan-pelatihan maupun seminar-seminar yang terkait dengan kebijakan Implementasi Pembangunan Program Nasional Dana Desa (DD).
3. Frekuensi penyuluhan dan penerangan dari pemerintah dalam rangka program lebih ditingkatkan agar pelaksanaan program Pembangunan di tiap desa Kecamatan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
4. Dalam rangka keberhasilan implementasi kebijakan Program Nasional Dana Desa (DD) hendaknya pelaksanaan koordinasi antara instansi terkait dalam rangka Program Nasional Dana Desa lebih diefektifkan.
5. Kualitas pelaksana (implementor) dalam rangka kebijakan Program Dana Desa (DD) pengembangan Kecamatan lebih ditingkatkan. Hal ini dapat dilakukan dengan memberi kesempatan aparat pelaksana (implementor) untuk melanjutkan jenjang pendidikan formalnya dan mengikutsertakan aparat untuk mengikuti jenjang pendidikan karier, seminar, lokakarya dan lain sebagainya.
6. Sesuai dengan pendapat **Hagul Peter** dalam Pembangunan desa dan lembaga swadaya masyarakat (1992:132) yang menyatakan: “hendaknya pembangunan yang dilaksanakan bukan dirasakan yang diberi melainkan bangunan yang diterima sebagai milik mereka sendiri” dengan ikhtisar argument beberapa sumber, manfaat dari partisipasi adalah efisiensi, efektifitas, kemandirian dan kesinambungan suatu proyek di desentralisasikan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Affandi, Nurachmad. (2001). *Isu-isu Strategis Penataan Otonomi Daerah,*

*Strategi Pemberdayaan Daerah Dalam Konteks Otonomi Daerah*

Yogyakarta: Philosophy Press.

Agustino, Leo (2006) *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung:Alfabeta.

Arikunto, Suharsimi.(2005) *Manajemen Penelitian*. Jakarta:Rineka Cipta.

BPS. (2018). Kecamatan Dalam Angka Salam Babaris

Chambers, Robert. (1995) *Pembangunan Desa; Mulai Dari Belakang.*

Jakarta LP3ES

Dunn, William.N. Terjamahan Wibawa Samodra dkk. 2003. *Pengantar*

*Analis Kebijakan Publik Gadjah Mada University Press*

Yogyakarta

Islamy, Irfan. 2004. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta

Kountur, Ronny, 2005, *Metode Penelitian*, Penerbit PPM, Jakarta.

Moleong, Lexy. J.2006. *Metologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Nugroho, Rian. D.2007. Analis Kebijakan, Elex Media Komputindo, Jakarta

Sayogya. 1993. *Konsep dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. Seminar Nasional Kemiskinan* di DPD Tk.I Jawa Timur

Surabaya

Singarimbun, Masri & Effendi, Sofian. 1989 *Metode Penelitian Survei*.LP3ES, Jakarta

Suradinata, Ermaya, 2006. Otonomi Daerah dan paradigma Baru Kepemimpinan Pemerintahan. Suara Bebas, Jakarta

Wahab, A. Solichin. 2005. *Analis Kebijaksanaan*. Bumi Aksara, Jakarta

1. Peraturan-peraturan

Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Permendagri nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Keputusan Camat Salam Babaris Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penunjukan Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan (TPHP)